

ANALISIS KELEMBAGAAN ORGANISASI DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh:

Rezha Mehdi Bazargan, Sri Suwitri, Maesaroh

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Seodarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Struktur organisasi merupakan susunan hierarki organisasi mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dalam tiap hierarki terdapat pembagian kerja yang kompleks dan memerlukan keahlian khusus dalam setiap pelaksanaan tugas. Struktur BPBD Provinsi Jawa Tengah memiliki kelebihan satu struktur pada pembidangan organisasi. Sumber daya manusia yang ada belum memiliki kompetensi yang sesuai bagi kebutuhan organisasi, timbulnya perselisihan antara pegawai, dan beban kerja antar bidang yang tidak merata. Hasil penelitian bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kelembagaan organisasi dan desain organisasi BPBD Provinsi Jawa Tengah. Tipe penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan analisis data menggunakan teknik analisis taksonomi. Pemilihan informan berdasarkan *purposive sampling* yang kemudian dikembangkan melalui *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi serta studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi organisasi terealisasi dengan efektif sesuai dengan target dan efisien dalam mengelola sumber dana. BPBD Provinsi Jawa Tengah memiliki struktur organisasi datar, dengan kelebihan satu struktur pembidangan. Jaringan kerja yang luas tercermin pada unsur pengarah. Organisasi fungsional belum terwujud dengan belum terisinya kelompok jabatan fungsional. Sebagai organisasi pembelajar, BPBD Provinsi Jawa Tengah terus melakukan peningkatan kualitas pegawai dan memberi kebebasan timbulnya aspirasi kolektif. Dalam hal desain organisasi, konfigurasi struktur yang sesuai dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah struktur sederhana dan struktur birokrasi profesional.

Kelembagaan organisasi BPBD Provinsi Jawa Tengah masih dalam penguatan kelembagaan. Diharapkan bagi BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dan sarana prasarana, mempertimbangkan mengisi jabatan fungsional, dan menginisiasi pertemuan pada *middle line*, agar tercipta pola komunikasi horisontal dengan *operating core*.

Kata Kunci : Kelembagaan Organisasi, BPBD Provinsi Jawa Tengah

ABSTRACT

The organizational structure is a hierarchical arrangement of organizations ranging from the lower level to the upper level. In each hierarchical division of labor are complex and require specialized expertise in each task execution. BPBDs structure Central Java province has advantages in the job descriptions of the structure of the organization. Human resources have yet to be appropriate competencies for the organization's needs, the emergence of a dispute between the employees and the workload between field uneven. Results of the study aims to describe and analyze the institutional organization and organizational design BPBDs Central Java Province. This type of research used qualitative descriptive data analysis using taxonomic analysis techniques. Selection informant by purposive sampling that later developed through snowball sampling. Data collection techniques used were observation, interviews, documentation and literature.

Based on this research, organizational strategy realized in accordance with the target effectively and efficiently manage resources. BPBDs Central Java province has a flat organizational structure, with the advantages of the structure of the job descriptions. Extensive networks reflected on the steering element. Functional organization has not materialized yet being filled with functional groups. As a learning organization, BPBDs Central Java Province continues to improve the quality of employees and freedom emergence of collective aspirations. In terms of organizational design, structural configurations according to the Regional Disaster Management Agency of Central Java province is a simple structure and the structure of professional bureaucracy.

Institutional organization BPBDs Central Java Province is still in institutional strengthening. Expected to BPBDs Central Java province to do to optimize the budget to improve the competence of personnel resources and infrastructure, consider filling the functional position, and initiate meetings on the middle line, in order to create a pattern of horizontal communication with the operating core.

Keywords: Institutional Organization, BPBD of Central Java Province

PENDAHULUAN

Organisasi perangkat daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan dan menyalurkan kepentingan pusat bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Organisasi perangkat daerah harus menjadi kuat dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam mengelola sumber daya. Secara kelembagaan, kualitas profesionalisme rata-rata organisasi perangkat daerah belum memuaskan. Sedarmayanti (2010:319) mengemukakan bahwa permasalahan yang terjadi pada

organisasi perangkat daerah ditandai dengan beberapa fenomena. Pertama, praktik manajemen sumber daya manusia yang belum benar. Kedua, berkaitan dengan tataran nilai mengenai efisiensi dan efektivitas yang belum maksimal. Dan ketiga, permasalahan struktur yang belum ramping dan datar.

Manusia merupakan faktor yang menentukan dalam setiap organisasi, termasuk dalam organisasi perangkat daerah yang memiliki sumber daya aparatur yang harus memiliki kompetensi dan

kinerja tinggi demi pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Secara struktural, organisasi perangkat daerah diharapkan menciptakan suatu fungsi-fungsi pokok yang terwujud dalam struktur organisasi yang menghindari kompleksitas jaringan kerja dengan mewujudkan pembagian tugas yang jelas, pendelegasian wewenang serta koordinasi yang jelas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga perangkat daerah dibentuk berdasarkan pedoman Permendagri Nomor 46 Tahun 2008. Permendagri muncul sebagai bentuk pelaksanaan pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 2 menjelaskan bahwa di setiap Provinsi dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008. Struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 4 (empat) bidang, 1 (satu) bagian, 8 (delapan) seksi dan 3 (tiga) sub bagian. Struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berbeda dengan struktur yang tercantum dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2008. Berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 15, susunan organisasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi terdiri dari 3 (tiga) bidang, 1 (satu) bagian, 6 (enam) seksi dan 3 (tiga) sub bagian. Dari kedua struktur kelembagaan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki lebih banyak bidang dibandingkan struktur pada Permendagri. Bidang penanganan darurat dan bidang logistik dan peralatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi satu bidang pada struktur Permendagri yakni bidang kedaruratan dan logistik. Hal ini menggambarkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak bidang yang memiliki tingkat desentralisasi dan spesialisasi yang tinggi. Berdasarkan observasi selama 30 hari kerja magang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian

struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengamatan tersebut peneliti menemukan gejala-gejala permasalahan, diantaranya pegawai yang ada belum memiliki kompetensi yang sesuai bagi kebutuhan organisasi, timbulnya perselisihan antara pegawai, dan beban kerja antar bidang yang tidak merata.

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk penggambaran susunan atau hierarki organisasi mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Pada tiap bagian dalam struktur memiliki pembagian kerja yang kompleks dan memerlukan pengalaman dalam setiap pelaksanaan tugas. Keterbatasan dalam pengetahuan pegawai merupakan hambatan dalam organisasi. Pegawai yang seharusnya menyelesaikan bagian tugasnya, harus mendapatkan porsi tambahan dari pegawai lainnya yang kurang cepat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dampak yang muncul adalah timbulnya perselisihan antara pegawai di salah satu bidang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Steer (1985:80) menjelaskan bahwa semakin besar unit kerja pada sebuah organisasi akan memberi pengaruh pada sikap dan tingkah laku pegawai, seperti berkurangnya kepuasan kerja, rendahnya tingkat kehadiran, merosotnya kebetahan, dan berpotensi menimbulkan perselisihan diantara pegawai. Dari berbagai latar belakang

permasalahan yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: (1) Apakah kelembagaan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik ? dan (2) Bagaimanakah desain organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah ?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menjelaskan dan menganalisis kelembagaan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan (2) Untuk menjelaskan dan menganalisis desain organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan tujuan penelitian, akan diperoleh kegunaan penelitian teoritis untuk membantu mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Administrasi Publik dan kegunaan praktis memberikan informasi ilmiah mengenai kelembagaan organisasi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, dan dapat memberikan suatu gambaran desain organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kelembagaan, atau institusi (lembaga), umumnya lebih diarahkan kepada organisasi. Konsep lembaga seringkali digunakan untuk melukiskan organisasi-organisasi yang inovatif dipandang sebagai melembaga sejauh fungsi-fungsinya memperoleh arti penting

yang tidak lagi terbatas atau bersifat lokal. Esman (Eaton, 1986: 23-24), mengartikan lembaga sebagai suatu organisasi formal yang menghasilkan perubahan dan yang melindungi perubahan dan jaringan dukungan-dukungan yang dikembangkan dalam lingkungan. Kemudian Eaton (1986: 159), menyatakan konsep mengenai lembaga sebagai jaringan baru berupa praktek-praktek terpola, seperti peraturan-peraturan dan hierarki kekuasaan, dalam satu unit administratif untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan dengan jelas. Dengan demikian organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi lembaga yang menjalankan perannya sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi maksimal antar pemerintah dengan institusi daerah lainnya. Dalam Sedarmayanti (2010: 336-337), kelembagaan dalam penataan organisasi dapat diwujudkan melalui organisasi yang memenuhi ciri sebagai berikut: (1) Mempunyai strategi yang jelas, visi dan misinya harus jelas. (2) Organisasi flat atau ditoleransikan bersifat dasar. Struktur organisasi berhierarki pendek dengan jenjang organisasi antara dua sampai dengan empat tingkat. (3) Organisasi ramping atau tidak terlalu banyak pembedangan secara horizontal. (4) Organisasi bersifat jejaring (*networking*). Jaringan kerja mampu mendorong terjadinya saling berbagi pengalaman,

saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proposional. (5) Organisasi bersifat fleksibel dan adaptif. Organisasi harus fleksibel dan adaptif agar mampu mengikuti setiap perubahan yang terjadi. (6) Organisasi banyak diisi jabatan fungsional yang mengedepankan kompetensi dan profesionalitas serta etos kerja tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. (7) Organisasi menerapkan strategi "*Learning Organization*". Organisasi yang mampu mentransformasikan dirinya untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang timbul akibat perubahan serta kemajuan yang sangat cepat. Dalam pencapaian kelembagaan yang baik, proses pengorganisasian diperlukan melalui penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Menurut Mintzberg (Robbins, 1994: 304) menyatakan bahwa setiap organisasi mempunyai lima bagian dasar yang dapat mendominasi sebuah organisasi. lima bagian dasar tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut: (1) *The operating core*, yaitu para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa. (2) *The strategic apex*, adalah pucuk pimpinan yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi itu. (3) *The middle line*, yaitu pimpinan yang menjadi penghubung *operating*

core dengan *strategic apex*. (4) *The technostructure*, adalah para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Dan (5) *The support staff*, adalah orang-orang yang mengisi unit staf, yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Salah satu dari kelima bagian tersebut dapat mendominasi sebuah organisasi. Disamping itu, bergantung pada bagian mana yang dikontrol, ada konfigurasi tertentu yang digunakan. Jika kontrol berada di *operating core*, maka keputusan akan didesentralisasikan. Hal ini menciptakan birokrasi profesional. Jika *strategic apex* yang dominan, maka kontrol didesentralisasi dan organisasi tersebut merupakan struktur yang sederhana. Jika *middle management* yang mengontrol, maka akan diketemukan kelompok dari unit otonom yang bekerja dalam sebuah struktur divisional. Jika para analis dalam *technostructure* yang dominan, kontrol akan dilakukan melalui standarisasi, dan struktur yang dihasilkan adalah sebuah birokrasi mesin. Akhirnya, dalam situasi dimana staf pendukung yang mengatur, maka kontrol akan dilakukan melalui penyesuaian bersama (*mutual adjustment*) dan timbullah *adhococracy*.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu dengan cara membandingkan gejala yang ditemukan. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti mencoba menjelaskan dan menganalisis kelembagaan organisasi dan desain struktur organisasi dengan mengambil lokus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol 1-F, Semarang.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sample*, artinya peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya. Kemudian dalam perjalanan penelitian dikembangkan melalui *snowball sampling*. Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi terhadap fenomena yang tampak dalam aktivitas-aktivitas, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian yang diamati tersebut. Kemudian, dalam pengambilan data menggunakan teknik wawancara kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung. Selain itu, data yang diperoleh juga didapatkan dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh instansi dalam hal ini dokumen dan peraturan perundang-undangan di Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis taksonomi dengan memperjelas istilah dalam domain khusus serta menemukan bagaimanakah istilah tersebut secara sistematis diorganisasikan atau dihubungkan. Dalam analisis ini fokus penelitian diarahkan atas domain tertentu yang telah ditentukan tentang perilaku yang dilakukan informan berkaitan dengan kelembagaan organisasi dan desain organisasi. Teknik yang digunakan dalam menguji kualitas data adalah teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan. Cara yang dapat dilakukan antara lain melakukan wawancara mendalam kepada informan, melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan, dan mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

PEMBAHASAN

Kelembagaan organisasi BPBD Provinsi Jawa Tengah menjadi lembaga yang efektif dan efisien dalam menjalankan perannya sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah jika memenuhi ciri: (1) mempunyai strategi yang jelas, (2)

Organisasi flat, (3) Organisasi ramping, (4) Organisasi bersifat jejaring (*networking*), (6) Organisasi banyak diisi jabatan fungsional, (7) Organisasi menerapkan strategi "*Learning Organization*".

Strategi Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki program dan kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Dalam LKj-IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2014, pencapaian 9 sasaran strategis telah terealisasi sesuai dengan target, serta telah melakukan efisiensi belanja kegiatan sebesar Rp. 3.775.401.064,- dengan mengelola sumber dana sebesar Rp. 32.020.994.000,- dengan realisasi dana sebesar Rp. 27.582.012.936,-. Secara efektif dan efisien Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat memanfaatkan sumber dana dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari sisi produktifitas, peningkatan kemampuan kerja aparatur BPBD Provinsi Jawa Tengah telah terwujud dengan pelaksanaan bimbingan teknis dan diklat yang melebihi target. Selanjutnya,

sarana prasarana yang belum memenuhi standar minimal *buffer stock logistic* yang harus dimiliki Provinsi Jawa Tengah. BPBD Provinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan dengan menempatkan stok logistik bencana pada masing-masing BPBD kabupaten/Kota agar dapat digunakan pada saat terjadi bencana. Apabila stok di kabupaten/kota terdampak bencana telah habis, maka stok logistik provinsi di kabupaten/kota terdekat dapat dimobilisasikan untuk daerah tersebut.

Organisasi Datar

Pada struktur organisasi BPBD Provinsi Jawa Tengah, memiliki jenjang organisasi dengan 3 tingkat. Sehingga memiliki *diferensiasi vertikal* rendah dengan rentang yang lebih lebar dan menciptakan organisasi yang lebih mendatar.

Organisasi Ramping

Berkaitan dengan aturan pembentukan organisasi, struktur yang ada belum sesuai dengan pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD. Secara substansi struktur BPBD Provinsi Jawa Tengah mendasar pada struktur BNPB yang terdiri dari empat bidang yaitu: Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Deputi

Bidang Logistik dan Peralatan. Dalam struktur organisasi BPBD Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan penataan kelembagaan melalui revisi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah. Revisi Peraturan Daerah tersebut telah sampai pada tahapan finalisasi Raperda dengan menyederhanakan bidang Penanganan Darurat dan bidang Logistik dan Peralatan menjadi satu bidang kedaruratan dan logistik. Akan tetapi, sesuai dengan surat edaran Sekretariat Daerah nomor 061/18537 perihal penundaan kegiatan penataan SOTK perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, SOTK BPBD Provinsi Jawa Tengah hasil penataan disesuaikan kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008.

Organisasi Jejaring

Organisasi yang menciptakan jaringan kerja yang mampu mendorong terjadinya saling berbagi pengalaman, saling berbagi dalam memikul tanggung jawab, dan pembiayaan secara proposional. Jaringan kerja yang luas telah tercermin pada unsur pengarah yang terdiri dari 6 (enam) pejabat instansi/lembaga pemerintah yang terdiri dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Cipta Karya

dan Tata Ruang dan Kepala Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air. Selain itu, instansi pemerintah daerah atau dinas lain terkait dengan penanggulangan bencana telah memikul tanggung jawab bersama dan pembagian tugas dari berbagai sektor dan elemen kebutuhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Organisasi Fungsional

Organisasi fungsional memiliki pejabat fungsional yang mengedepankan kompetensi dan profesionalitas serta etos kerja tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki kelompok jabatan fungsional yang mempunyai keahlian khusus dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil penelitian, dalam struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terdapat unsur pengarah, yang fungsinya hampir sama dengan fungsi jabatan fungsional yang memiliki fungsi merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Organisasi Pembelajar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas pegawai guna meningkatkan

kompetensi dan pengetahuan kebencanaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah selalu mengikutsertakan pegawai struktural maupun staf untuk dapat mengikuti setiap pelatihan yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri, BNPB maupun lembaga-lembaga non pemerintah untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan masing-masing kebutuhan tiap bidang. Selain mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, pimpinan dalam hal ini Kalakhar juga memberi kebebasan timbulnya aspirasi kolektif, melalui rapat jam pimpinan. Pimpinan menghadirkan seluruh jajaran struktural dan stafnya untuk memonitoring, *briefing*, dan *crosscheck* terhadap program-program bidang, kemudian membahas masalah-masalah yang dihadapi pegawai mulai dari pejabat struktural hingga jajaran staff pegawai.

Desain Organisasi

Dalam desain struktur organisasi BPBD Provinsi Jawa Tengah, domain *strategic apex* sudah mendelegasikan tugas pada bawahannya. Kalakhar selaku pimpinan unsur pelaksana sudah berusaha membagi secara adil dalam mendelegasikan tugas pada *middle line*. Kemudian mengenai hubungan secara horizontal terhadap *technostructure*, unsur pelaksana dengan unsur pengarah masih dalam proses

untuk menuju optimal. Dalam hal komunikasi antar bidang pada *middle line* sudah terintegrasi dengan baik. Selain itu, fungsi-fungsi pada satuan kerja sudah di komunikasikan dengan baik secara *top down* pada *operating core* dan *bottom up*. Pada *Support Staff* sebagai penunjang administrasi, dalam sub bagian umum kepegawaian, sub bagian program, dan sub bagian keuangan sudah berjalan baik. Selain itu pelayanan untuk penugasan mendadak dan tidak terencana yang membutuhkan anggaran sudah didukung *support staff* dengan baik. Namun, *support staff* sebagai penunjang administrasi diharapkan tetap melakukan peningkatan. *Support staff* diharapkan lebih cepat dalam merespon fungsi-fungsi dari *middle line*. Selanjutnya, domain *operating core* pada struktur BPBD Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat tumpang tindih antara pegawai, yang ada hanya pendelegasian tugas oleh *middle line* yang bersifat tugas pembantuan karena keterbatasan pegawai.

Konfigurasi struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Struktur Sederhana dan Struktur Birokrasi Profesional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana, kontrol berada pada *operating core*. Sehingga konfigurasi yang digunakan adalah Struktur Birokrasi Profesional. Pada saat Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah menjalankan fungsi pengkomandoan tanggap darurat, *strategic apex* menjadi dominan dengan kontrol desentralisasi dan organisasi akan menjadi struktur sederhana. Struktur sederhana dikarakteristikkan dengan tingkat kompleksitas rendah, mempunyai sedikit formalisasi, dan mempunyai wewenang yang desentralisasi pada domain *strategic apex* didominasi oleh Kepala BPBD *ex-officio* Sekretaris Daerah yang akan menjalankan fungsi komando dan koordinasi terhadap seluruh aspek operasi tanggap darurat.

PENUTUP

Kelembagaan BPBD Provinsi Jawa Tengah masih dalam tahap melakukan penguatan kelembagaan, mulai dari sumber daya manusia terus melakukan peningkatan kemampuan kerja, dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana. Strategi organisasi terealisasi dengan efektif sesuai dengan target dan efisien dalam mengelola sumber dana. BPBD Provinsi Jawa Tengah memiliki struktur organisasi datar, dengan kelebihan satu struktur pembidangan. Jaringan kerja yang luas tercermin pada unsur pengarah dan instansi pemerintah daerah atau dinas lain terkait dengan penanggulangan bencana. Organisasi fungsional belum terwujud dengan belum terisinya kelompok jabatan fungsional.

Sebagai organisasi pembelajar, BPBD Provinsi Jawa Tengah terus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas pegawai dan memberi kebebasan timbulnya aspirasi kolektif, melalui rapat jam pimpinan.

Konfigurasi desain organisasi BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah Struktur Sederhana dan Struktur Birokrasi Profesional. Fungsi *strategic apex* menjadi dominan pada saat pengkomandoan tanggap darurat dengan kontrol disentralisasikan dan organisasi akan menjadi struktur sederhana. Domain *strategic apex* didominasi kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah *ex-officio* Sekretaris Daerah yang akan menjalankan fungsi komando dan koordinasi terhadap seluruh aspek operasi tanggap darurat. Setelah masa tanggap darurat selesai, fungsi koordinasi dan pelaksana dijalankan dengan kontrol berada pada *operating core*. Sehingga konfigurasi yang digunakan adalah Struktur Birokrasi Profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- BPBD. (2012). *Rencana Penanggulangan Bencana*. Jawa Tengah : BPBD.
- BPBD. (2015). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014*. Jawa Tengah : BPBD.
- Eaton, J. W. (1986). *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: Dari Konsep ke Aplikasi*. Jakarta : UI-Press.

Robbins, Stephen P. (1994). *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta : Arcan.

Sedarmayanti. (2010a). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Refika Aditama.

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga.

PERATURAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

_____. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah.

_____. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

_____. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

